

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 6 No. 1 April 2013

MENAKAR *RES JUDICATA*



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol. 6	No. 1	Hal. 1-94	Jakarta April 2013	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	--------------	-----------------------	-------------------

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Filsafat Hukum dan Pidana)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana)

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Penanggung Jawab : Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.

Redaktur : 1. Drs. Patmoko (Bidang Studi Ekonomi dan Pembangunan)
2. Dra. Titi A. Winahyu (Bidang Studi Komunikasi)

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Imran, S.H., M.H. (Bidang Hukum Pidana)
3. Nur Agus Susanto, S.H.,MM. (Bidang Hukum Internasional/
Pariwisata)
4. Muhammad Ilham, S.H. (Bidang Hukum Administrasi Negara)
5. Ikhsan Azhar, S.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Sekretariat : 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Aran Panji Jaya, S.T.
4. Eka Desmi Haryati, A. Md.
5. Andri Kurniadi, A. Md.
6. Wirawan ND. A.Md.
7. Sri Djuwati

Desain Grafis & Fotografer : 1. Dinal Fedrian, S.IP.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

MENAKAR *RES JUDICATA*

Rasanya sulit untuk hanya diam jika mencermati kondisi dunia peradilan saat ini, reformasi peradilan yang telah dijalankan selama lebih dari sepuluh tahun lalu tetap menyisakan pekerjaan yang belum selesai. Misi utama reformasi peradilan yang tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparialitas peradilan, tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim agar peradilan tidak memunculkan *abuse of power* baru pada dasarnya belum selesai.

Komisi Yudisial meyakini bahwa bagaimanapun juga hakim sebagai sebuah profesi tidak bisa berdiri sendiri, cara pandang yang melihat hakim secara mekanis, yang berarti menjadikannya sebagai orang yang steril, bebas nilai, bersih dari kepentingan serta dilepaskan dari segala yang bersifat manusiawi dan terhindar sama sekali dari pengaruh lingkungannya dianggap tidak tepat. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bagaimana mungkin seseorang hakim bisa bekerja menganalisis sebuah perkara hanya ”murni” dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku, karena sebenarnya hakim itu sudah terpengaruh perspektif pendidikannya, gendernya, psikologinya, agamanya, status sosialnya dan kelas sosialnya, tradisinya, dan bahkan ideologi keilmuannya.

Uraian di atas akhirnya menuntun juga edisi Jurnal Yudisial kali ini dengan mengangkat judul “Menakar *Res Judicata*” (dalam bahasa populernya dapat disebut menguji putusan hakim) sebagai bahasan yang dominan. Redaksional *res judicata* sendiri diambil dari asas hukum yang berbunyi *res judicata pro veritate habetur* yang berarti “putusan hakim dianggap benar serta merta”. Relevansi antara judul dengan isi jurnal yang coba dikemukakan adalah mengenai pengujian kembali terhadap berbagai putusan hakim yang isinya justru menguji keputusan atau kewenangan dari pemerintah maupun parlemen. Mengingat di manapun entitasnya dan apapun sistem hukumnya, kekuasaan kehakiman melalui hakim sebagai aktor utamanya selalu menjadi kontrol bagi cabang kekuasaan yang lain. Tapi, betapapun diposisikan sebagai kontrol jika kita mengingat kembali cara pandang yang melihat hakim tidak secara mekanis maka peluang koreksi tetap ada, terutama pada produk utamanya yakni putusan hakim.

Kata “menakar” di sini tidak hendak ditujukan untuk mencari kekeliruan yang dilakukan para hakim tetapi justru sebagai masukan membangun sebagai bahan koreksi kemapanan profesi hakim sendiri. Karena stagnansi ilmu dalam dunia peradilan dapat dipandang sebagai suatu hal yang haram terjadi, maka *exercise* terhadap dunia peradilan harus terus dilanjutkan. Dengan demikian, untuk bersikeras agar “tidak hanya diam” dalam berkontribusi membangun dunia peradilan yang agung, melalui Jurnal Yudisial ini dipastikan kritik yang bertanggung jawab kepada dunia peradilan akan terus dan tetap ada.

Terima kasih

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

ARTI PENTING UU NO. 1/PNPS/1965 BAGI KEBEBASAN BERAGAMA	1
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Hwian Christianto, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya	
PENERAPAN KONSEP HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI PEKERJA ALIH DAYA	17
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 Iskandar Muda & Muhammad Kadafi Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, Bandar Lampung	
KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN	33
Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009 Victor Imanuel W. Nalle, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya	
PERSELISIHAN <i>SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE</i> DENGAN MAZHAB SEJARAH DALAM KASUS "MERARIK"	48
Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra Widodo Dwi Putro, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram	
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK	64
Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg Bilher Hutahaeen, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Bontang	
KAIDAH ILMIAH DALAM SELIMUT KEPUTUSAN PENGUASA: MENGUJI PUTUSAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA	80
Kajian Putusan Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN.JKT Deni Bram, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta	

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 6 No. 1 April 2013

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 342.7

Christianto H (Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya)

Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

Jurnal Yudisial 2013 6(1), 1-16

Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Dalam perkembangannya UU No. 1/PNPS/1965 ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi juridis formil maupun materiil. Permohonan pengujian undang-undang pun diajukan untuk memperjelas konstusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 yang justru dinilai menghambat toleransi kehidupan beragama. Isu hukum yang menarik adalah tentang hubungan negara dan agama di dalam konteks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Di sisi lain, UU No. 1/PNPS/1965 juga memberikan tiga bentuk kejahatan yang sangat berpengaruh bagi hukum pidana.

(Hwian Christianto)

Kata kunci: kebebasan beragama, hak asasi manusia.

UDC 347.454

Muda I & Kadafi M (Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati, Bandar Lampung)

Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011

Jurnal Yudisial 2013 6(1), 17-32

Pada tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan uji formil dan materiil terhadap UUD 1945, telah melakukan Uji Materiil Konstusionalitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam amar putusannya yang tertuang di dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak konstusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Apabila makna putusan itu kemudian ditelaah secara *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menerapkan konsep ilmu hukum pembangunan ekonomi dalam upaya pencegahan eksploitasi pekerja *outsourcing*, sehingga terciptalah keadilan dalam hubungan ekonomi.

(Iskandar Muda & Muhammad Kadafi)

Kata kunci: pekerja alih daya, tidak konstusional bersyarat.

UDC 34.037 Nalle VIW (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya) Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009 <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 33-47 Berdasarkan konsep negara hukum, pemerintah melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan pemerintah tidak dapat membuat peraturan perundang-undangan yang tidak didelegasikan oleh undang-undang. Pada praktiknya, berdasarkan prinsip diskresi, pemerintah dapat membentuk peraturan kebijakan. Sebagian besar ahli hukum mengkategorikan peraturan kebijakan bukan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika demikian, tidak terdapat lembaga peradilan yang dapat melakukan uji material karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya uji material peraturan kebijakan pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi. Tulisan ini akan menganalisis putusan pengujian surat edaran tersebut, yaitu Putusan Nomor 23 P/HUM/2009. Melalui analisis tersebut akan diketahui apakah Mahkamah Agung, secara teoretis maupun yuridis, memiliki wewenang melakukan uji material terhadap peraturan kebijakan atau justru sebaliknya. (Victor Imanuel W. Nalle) Kata kunci: diskresi, peraturan kebijakan, uji material.	UDC 340.12 Putro WD (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram) Perselisihan <i>Sociological Jurisprudence</i> dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus "Merarik" Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 48-63 Pada umumnya, perkawinan suku Sasak, didahului dengan proses membawa lari (<i>merarik</i>) calon istri. Jika keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan, tanpa meminta izin kepada kedua orangtua, si perempuan dibawa lari untuk dinikahi. Permasalahannya, jika orang tua keberatan dan perempuan yang dibawa lari di bawah umur, biasanya berujung pada meja hijau. Muncul perselisihan paradigma, jika pelaku <i>merarik</i> dijerat hukum pidana bukankah seolah-olah hukum adat tersebut identik dengan kejahatan dari kacamata hukum formal, padahal di sisi lain ia merupakan hukum yang hidup di masyarakat? Putusan hakim dalam kasus <i>merarik</i> tentu tidak "bebas-nilai", disadari atau tidak, merupakan perselisihan paradigma, yakni <i>sociological jurisprudence</i> yang hendak merekayasa masyarakat menjadi lebih modernis dengan mazhab sejarah yang masih ingin mempertahankan tradisi dan kebiasaan lama. (Widodo Dwi Putro) Kata kunci: <i>merarik</i>, perselisihan paradigma, <i>sociological jurisprudence</i>, mazhab sejarah. UDC 343.137.5 Hutahaean B (Fakultas Hukum, Universitas Trunajaya Bontang, Bontang) Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak
--	--

Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 64-79 Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Dalam perkara pidana Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg terdakwa adalah anak yang masih berumur 15 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana mestinya. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pemidanaan sebagai <i>ultimum remedium</i>. (Bilher Hutahaean) Kata kunci: peradilan anak, sanksi pidana, <i>ultimum remedium</i>.	izin kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, namun juga aspek ini memberikan sarana untuk menguji aspek ilmiah yang berbalut kaidah normatif pemberian izin. Kasus Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta dapat dikatakan menjadi suatu sengketa yang berjalan dalam dimensi waktu yang lama (2003 – 2011), padahal objek sengketa yang dipertentangkan merupakan hasil kajian ilmiah yang bertahan secara ilmiah tidak lebih dari hitungan bulan semata. Dalam tulisan ini terdapat beberapa hal utama yang penulis tengahkan. Pertama, menelisik lebih dalam hakikat dari AMDAL itu sendiri. Kedua, upaya hukum yang tersedia dalam hal tidak puas dari hasil penilaian AMDAL. Terakhir, mengkaji pemahaman para jurist terhadap AMDAL serta baik dalam dimensi ekologis maupun dimensi yuridis. (Deni Bram) Kata kunci: AMDAL, sengketa lingkungan, keputusan administrasi negara.
UDC 349.631 Bram D (Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta) Kaidah Ilmiah dalam Selimut Keputusan Penguasa: Menguji Putusan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Kajian Putusan Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN. JKT <i>Jurnal Yudisial</i> 2012 6(1), 80-94 Sengketa lingkungan dalam upaya penegakan hukum administrasi selalu menarik untuk diperbincangkan. Bukan hanya karena aspek ini dianggap merupakan sarana pengontrolan	

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 6 No. 1 April 2013

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 342.7

Christianto H (Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya)

The Significant Impact of Law Number 1/PNPS/1965 for the Freedom of Religion

An Analysis on Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2013 6(1), 1-16

The application of Law Number 1/PNPS/1965 essentially has significant effects on the religious life for Indonesian people. The legislation has explicitly determined the prohibition on religious deviance, blasphemy, as well as atheism. Furthermore, the law has been considered not in line with the 1945 Constitution both in formal and material aspects. The review was initially aimed to clarify the constitutional interpretation of Law No. 1/PNPS/1963 as it hampered the interfaith tolerance. The main issue arising from this topic is the correlation between religion and state in the context of Pancasila (the five basic principles) and the 1945 Constitution, especially on Article 28E paragraph (1) and (2), Article 28I paragraph (1), and Article 29 paragraph (2). In addition, Law Number 1/PNPS/1965 has also created three kinds of crime as predisposing factors for criminal law.

(Hwian Christianto)

Keywords: freedom of religion, human rights.

UDC 347.454

Muda I & Kadafi M (Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati, Bandar Lampung)

The Application of the Concept of Laws on Economic Development in Preventing the Exploitation of Outsourced Labours

An Analysis on Constitutional Court Decision Number 27/PUU-IX/2011 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2013 6(1), 17-32

On 17 January 2012, the Constitutional Court, as an institution authorized to perform formal and substantive review on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has done Judicial Constitutional Review on Law Number 13 of 2003 concerning Labours. In the verdict of the Decision Number 27/PUU-IX/2011, the Constitutional Court stated that Article 65, paragraph 7, and Article 66 paragraph 2 letter b of Law Number 13 of 2003 concerning Labours is conditionally unconstitutional. If the verdict is explored and interpreted in a quo, then it implies that the Constitutional Court has applied the concept of Laws on Economic Development in efforts to prevent the exploitation of outsourced labours and thus create justice in economic relations

(Iskandar Muda & Muhammad Kadafi)

Keywords: outsourced labours, conditionally unconstitutional.

UDC 34.037 Nalle VIW (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya) Judicial Authority in Reviewing Policy Rules An Analysis on Supreme Court Decision Number 23P/HUM/2009 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 33-47 Based on the rule of law concept, a government should act in accordance with legislation and it can not produce any regulation without obtaining delegation from the legislation. But in practice the government, based on the principle of discretion, may issue a policy rule. Most of the scholars categorize a policy rule not as legislation and has no binding force. If so, Indonesia's legal system has no juridical institutions that can review such a rule because the Supreme Court and Constitutional Court can only examine regulations or legislation. In fact, the judicial review of policy rules has been carried out by the Supreme Court to the Circular of the Director General of Mineral, Coal and Geothermal. This paper will analyze the decision of circular's judicial review, that is the Decision No. 23 P/HUM/2009. Through the analysis will be known, theoretically and legally, whether the Supreme Court authorized reviewing policy rules. (Victor Imanuel W. Nalle) Keywords: discretion, policy rule, judicial review.	An Analysis on Decision Number 232/Pid.B/2008/PN. Pra (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 48-64 It is quite common the weeding processing in Sasak tribe is preceded with eloping, known as 'merarik'. The eloping happens if and only if there is no coercion to the girl and both love with each other. The girl is taken away to be married without the parents' permission. It is a problem if the parents objected and the girl eloped is still under age. This case usually end up in court. A conflict of paradigms occurs, if the man who did 'merarik' is brought to criminal justice. The customary law appears to be treated as a crime in formal law perspective, while in fact it is a law living in the society. The judge's decision in "merarik" case is certainly not "value-free". Realizing it or not, this is a conflict of paradigms, namely sociological jurisprudence aimed at engineering a more modernist society, and the history school of law which still strives to preserve the old traditions and customs. (Widodo Dwi Putro) Keywords: merarik, paradigm conflict, sociological jurisprudence, the history school of law.
UDC 340.12 Putro WD (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram) The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence and the History School of Law in 'Merarik' Case	UDC 343.137.5 Hutahaeen B (Fakultas Hukum, Universitas Trunajaya Bontang, Bontang) Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids An Analysis on Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 64-79 Children are the mandate and grace of God Almighty. They have dignity and worth as fully

human beings. Legal treatment of children should receive serious attention, because children are the future of the nation. In the criminal case number 50/Pid.B/2009/PN.Btg, the defendant, a 15-year-old boy, was charged with conduct, and punishable as provided in Article 363, paragraph (1) to (4) jo Article 65 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Judges imposed imprisonment for 6 (six) months to the defendant and later returned him to his parents as he should . The decision did not seem to reflect the rule of law or legal certainty of the defendant, and did not address criminal sanction as the ultimum remedium.. (Bilher Hutahaeen) Keywords: juvenile court system, penal sanction, ultimum remedium.	2011. Whereas, the subject of dispute in conflict is resulted from a scientific study which lasted only a few months. In this analysis, there are several main things that will be elaborated; first, a deeper exploration into the nature of the AMDAL itself; second, the legal action regarding objection of the result of AMDAL; and lastly, the attempt to examine legal understanding of the jurists on both ecological and juridical dimension in AMDAL of North Coast Jakarta Reclamation and Revitalization Case. (Deni Bram) Keywords: Environmental Impact Assessment (AMDAL), dispute on environmental law, administrative decision.
UDC 349.631 Bram D (Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta) Unveiling Scientific Justification Within a State Official Decision: the Case of North Jakarta's Coastal Reclamation An Analysis on Decision Number 75/G. TUN/2003/PTUN.JKT (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2013 6(1), 80-94 Environmental disputes in administrative law enforcement is always interesting to discuss. Not only because these aspects are considered as the means to control the licences of activities that give bad impact to the environment, but also means to test the scientific aspects wrapped in the normative rules of lisencing. Environmental Impact Assessment (EIA, known as AMDAL) Case regarding North Coast Jakarta Reclamation and Revitalization is arguably such a long term dispute that have been running from 2003 to	